BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2018
KABUPATEN LEBONG
SABTU, 24 NOVEMBER 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

	POSITIF	X	NETRAL		BAHAN PEMERIKSAAN		PERHATIAN KHUSUS

Dua Kasus Dugaan Korupsi Menggantung

LEBONG, BE - Hingga saat ini, 2 dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong sejak tahun 2017 yang lalu masih mengambang, kapan akan dilimpahkan ke Pengadilan tipidkor Bengkulu. Hal ini dikarenakan penghitungan Kerugian Negara (KN) belum didapat.

Adapun 2 kasus yang ditangani Kejari Lebong yang saat ini belum diketahui kapan akan dilimpahkan ke tahap selanjutnya yaitu dugaan korupsi kegiatan fisik DD di Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis senilai Rp 618,8 juta.

Perhitungan kerugian negara dilakukan pada 4 item pekerjaan yaitu Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL), fisik pembangunan Penyediaan Sarana Air Bersih (PSAB), fisik bangunan Jalan Usaha Tani (JUT) serta pembangunan jalan lingkungan.

Dari hasil cek fisik dengan melibatkan ahli bidang konstruksi dari Universitas Hazairin (Unihaz) Bengkulu, ditemukan sejumlah item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dari perencanaan.

Untuk 1 kasus lagi yaitu dugaan korupsi pembuatan naskah soal ujian nasional (unas) SMP dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD Tahun Anggaran 2017.

Dari dana kegiatan senilai Rp 397 juta, namun hanya Rp 341 juta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara sisahnya Rp 56 juta lagi tidak terakomodir dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj). Dimana dalam kasus ini, penyidik Pidsus Kejari Lebong telah memeriksa lebih 30 saksi baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga kalangan guru yang terlibat dalam penyusunan naskah Unas dan UASBN.

Kepala Kejari Lebong, Endang Sudarma SH MH melalui KAsi Pidsus Yogi Sudharsono SH, mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil penghitungan KN dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Saat ini pemeriksaan sudah berjalan dan kita tinggal menunggu hasilnya," jelasnya, kemarin (23/11).

Ditambahkan Yogi, pihaknya meminta kepada pihak BPKP melakukan pemeriksaan Kn atas kasus yang ditanganinya pada pertengahan tahun 2018.

Namun hal tersebut belum dilakukan pemeriksaan. Bahkan pihaknya sudah beberapa kali mengirimkan surat kepada BPKP untuk melakukan pemeriksaan. "Kendalanya hasil KN, jika hasilnya sudah diketahui maka kita bisa melanjutkan kasus yang kita tangani ke tahapan selanjutnya, ucapnya.**(614)**